



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA **KECAMATAN MUARA BADAK**

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan pertolonganNya semata Usulan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat tersusun pada waktunya, dimana Usulan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kinerja yang tertuang dalam Renstra yang meliputi tujuan dan Sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan pada SKPD Kantor Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu tahun anggaran 2022.

Daftar Usulan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun anggaran 2022 ini tersusun atas pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta beberapa lampiran Tabel Data Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 yang diperlukan guna penetapan capaian nilai indikator kinerja.

Disadari sepenuhnya bahwasannya penyajian Usulan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun Anggaran 2022 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan/saran-saran dari semua pihak agar dapat segera dilakukan penyempurnaan pada Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya.

Besar harapan, semoga Usulan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini dapat mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Usulan Rencana Kerja ini.

Muara Badak, 12 September 2022

Camat Muara Badak,



ARPAN,S.Sos
Pembina
Nip. 196806121988031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN BERJALAN	7
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun berjalan dan Capaian Renstra-PD.	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	29
3.1 Program dan Kegiatan	29
BAB IV : PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Keg'a Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun Rancangan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2021 dengan mengacu kepada pedoman sebagai berikut :

1. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022
2. Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
3. Pedoman Penyusunan Rancangan Renja-PD Tahun 2022.

Dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Perangkat Daerah serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tata cara penyelenggaraan difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait. Untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja-OPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom - up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak - pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari

program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah membahas rancangan Renja-Perubahan dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja-PD, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait. Dalam forum ini dilakukan penyelerasan usulan anatara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan draft Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu. Forum Perangkat Daerah juga ditujukan sebagai arena untuk melakukan sinergitas antara usulan kegiatan yang bersifat spasial dan usulan sektoral.

Forum Lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraannya Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara gabungan, forum ini ditujukan sebagai arena sinkronisasi Program dan kegiatan agar terjadi dalam pelaksanaannya saling terkait, dan menghindari tumpang tindih kegiatan. Dasar pemikirannya bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang saling terkait antar sektor, sehingga dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan keterkaitan, baik antar wilayah, ruang maupun waktu. Forum Gabungan diselenggarakan dengan mempertimbangkan keterkaitan isu strategis dari setiap perangkat daerah, dan isu strategis Pembangunan Daerah. Dimana isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Tujuan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta mengacu pada target kinerja RPJMD Tahun 2022.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar dalam rangka optimalisasi pencapaian OPD dengan OPD lainnya sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Perbup Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Perbup Perbup Kutai Karatnegara No. 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil;
5. Perbup Kutai Karatnegara No. 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Muara Badak Tahun 2022;
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Muara Badak Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan kecamatan Muara Badak tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Muara Badak dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja-PD dan Capaian Renstra-PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja Perubahan mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor...Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun *tugas pokok dan fungsi dari Kantor Camat Muara Badak* adalah:

A. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data *base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum
6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana & fasilitas pelayanan umum;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
10. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan; pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Evaluasi Pelaksanaan Renja didasarkan atas (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Tahun 2022, pelaksanaan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan, keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama 6 (enam) tahun berjalan. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja pada akhir tahun 2022.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan RENJA-PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota target pagu anggaran sebesar Rp. 5.848.551.291 dan realisasi semester pertama sebesar Rp.2.275.140.437 atau 39 % maka target realisasi program/kegiatan tersebut tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pagu anggaran sebesar Rp.480.600.000 dan realisasi semester pertama sebesar Rp.149.216.500 atau 31 % maka target realisasi program/kegiatan tersebut tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Program PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK pagu anggaran sebesar Rp. 9.370.207.047 dan realisasi semester pertama sebesar Rp.0 atau 0 % maka target realisasi program/kegiatan tersebut tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Program PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM pagu anggaran sebesar Rp. 19.754.000 dan realisasi semester pertama sebesar Rp.4.200.000 atau 21.2 % maka target realisasi program/kegiatan tersebut tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
5. Program PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA pagu anggaran sebesar Rp. 43.803.750 dan realisasi semester pertama sebesar Rp. 0 atau 0 % maka target realisasi program/kegiatan tersebut tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi program/kegiatan antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap aplikasi SIPD sehingga dipandang perlu diadakan Bimbingan Teknik/Sosialisasi.
2. Ketersediaan Nomenklatur diaplikasi SIPD pada kegiatan fisik tidak tersedia dan Deadline waktu tidak cukup dalam melakukan perubahan dari belanja Modal ke belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakat.
3. Ketersediaan Standarisasi harga banyak yang tidak tersedia, dan harga tidak sesuai dengan harga setempat.
4. Waktu penyusunan/pengimputan anggaran kurang.

Akibat yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut diatas maka realisasi serapan anggaran sangat kurang dari pencapaian target kinerja hasil/keluaran dari kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

TABEL
PELAKSANAAN APBD TRIWULAN II TAHUN 2022

Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan/Renstra OPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (APBD 2022)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2022)			Keterangan
				K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	(6=5/4*100)	7	8	9=(8/7)	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.848.551.291	2.275.140.437	39	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						174790000	45.939.200	26	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	2 Dokumen	0,5	25,000,000	12.986.000	51,9	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0	15,000,000	10.153.200	67,7	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0	15,000,000	0	0,0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0	9,520,000	6.930.000	72,8	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0	10,270,000	0	0,0	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	0 laporan	0	100.000.000	15.870.000	15,9	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.739.957.534	1.579.736.385	42	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/b	150 Orang/b	0,5	3,640,623,034	1.525.136.385	42	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0	25,184,500	11.550.000	46	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	1 laporan	0,3	74.150.000	43.050.000	58	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						65.761.100	17.000.000		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	1 Dokumen	0 Dokumen	0	24,961,100	0	0	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0	40,800,000	17.000.000	41,6	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						29.092.500	0	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 orang	39 orang	100	29,092,500	0		

Administrasi Umum Perangkat Daerah						464.486.000	155.780.486	34	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 laporan	0 laporan	0	10,000,000	0	0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	0 laporan	0	20,000,000	19.888.000	99,4	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 laporan	0 laporan	0	97,289,000	30.437.000	31,3	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 laporan	0 laporan	0	30,000,000	7.361.000	24,5	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	0 laporan	0	32,469,000	8.196.000	25,2	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	0 laporan	0	224,728,000	87.588.486	39	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 laporan	0 laporan	0	50,000,000	2.310.000	4,6	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						820.084.577	261.362.098	32	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	1 Laporan	1 laporan	100	1,989,000	1.989.000	100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	0 laporan	0	535,707,209	142.050.808	26,5	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	1 Laporan	0 laporan	0	12,568,000	5.906.030	47	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	1 Laporan	0 laporan	0	269,820,368	111.416.260	41,3	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						554379580		39	

							215.322.268		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	100	382,656,900	209.900.268	54,8	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	24 unit	10 unit	41,6	49,560,000	5.422.000	10,9	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	1 unit	0 unit	0	122,162,680	0	0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							0	0	
						9.370.207.047			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.370.207.047	0	0	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	0 Laporan	0	30,400,000	0	0	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	0 Laporan	0	9.289.407.047	0	0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						480.600.000	149.216.500	31	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						480.600.000	149.216.500	31	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	65 Lembaga Kemasyarakatan 300 Orang	66 Lembaga Kemasyarakatan 300 Orang	100	75,000,000	50.975.000	67,9	

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	0 Dokumen	0	72,600,000	15.568.500	21,4	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	2 laporan	40	333,000,000	82.673.000	24,8	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							19.754.000	4.200.000	21,2
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							19.754.000	4.200.000	21,2
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0 Laporan	0	19,754,000	4.200.000	21,2	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							0	0	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							43.803.750	0	0
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	"Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa"	1 Dokumen	0 Dokumen	0	22,811,250	0	0	

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	"Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya"	1 Laporan	0 Laporan	0	20,992,500	0	0	
--	--	---	-----------	-----------	---	------------	---	---	--

2.2 Analisis Kinerja pelayanan perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Muara Badak yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Muara Badak dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Muara Badak sesuai Renstra Tahun 2021-2026 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Muara Badak, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Muara Badak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan kepada Pemerintahan kecamatan dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Setelah tersusun sasaran kinerja kemudian digunakan data tersebut untuk merancang indikator kinerja, yang terdiri dari indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat dan indikator dampak. Identifikasi dan penetapan indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Indikator Masukan (inputs)** : mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, peralatan, material, dan masukan lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat dianalisa alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
- b. **Indikator Keluaran (Outputs)** : digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisa sejauh mana kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator ini hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

- c. **Indikator Hasil (Outcomes)** : menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya para pembuat kebijaksanaan paling tertarik pada indikator ini dibanding dengan indikator lainnya. Namun informasi yang diperlukan untuk mengukur hasil seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh, oleh karena itu diperlukan pengkajian berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari keluaran suatu kegiatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak selama kurun waktu tahun 2021-2026 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Muara Badak yang dapat terealisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 97.82% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Badak, yaitu :

- a. Predikat Akuntabilitas Kinerja;
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat;
- c. Indeks Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
- d. Tingkat Capaian Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Badak dapat dilihat dari **Tabel 2** pada lampiran.

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran	-	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	94.88%	99.97%	95.12%	92.46%	56.70%	92.46%	100%	100%	Pagu Anggaran Mengalami Pergeseran
2	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-	Persentase Kepuasan Masyarakat	89.62%	99.94%	95.24%	96.41%	50.00%	96.41%	100%	100%	Penambahan Pagu Anggaran
3	Rata-rata nilai kinerja SKP	-	Nilai rata-rata SKP ASN	0%	99.98%	93.12%	99.64%	50.03%	99.64%	0.00%	0.00%	-
4	Tingkat Ketepatan waktu Laporan Capaian kinerja dan keuangan	-	Presentase Penurunan Temuan Audit	0%	99.98%	93.12%	99.64%	50.03%	99.64%	99.98%	100%	Pagu Anggaran Mengalami Pergeseran
5	Indek Kepuasan Masyarakat	-	Persentase Kepuasan Masyarakat	0%	100%	100%	100%	50.00%	100%	100%	100%	Penambahan Pagu Anggaran
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	-	Prosentase Capaian Pembangunan	100%	100%	99.99%	38.94%	51.07%	38.94%	100%	100%	Pergeseran antara rekening
7	Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik	-	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	94.83%	98.51%	97.91%	97.65%	0%	97.65%	98%	99%	-
8	Cakupan Panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	-	Prosentase Capaian Pembangunan	49.98%	98.96%	98.110%	97.470%	0%	97.470%	99%	97%	-
9	Cakupan drainase & gorong-gorong dalam kondisi baik	-	Prosentase Capaian Pembangunan	58.92%	95.10%	98.240%	97.190%	0%	97.190%	96%	96%	-
10	Cakupan pembangunan turap	-	Prosentase Capaian Pembangunan	0%	95.76%	96.64%	97.980%	0%	97.980%	97%	98%	-

2.3 Review Terhadap Rancangan Rencana Awal RKPD.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan.

Review rancangan rencana kerja OPD adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan pagu indikatif kecamatan berdasarkan kuota/hasil analisis kebutuhan PD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi OPD. Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam tabel 1.3 berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : KECAMATAN MUARA BADAK

Urusan :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2022				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				Selisih Antara Pagu APBD 2022 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan
		LOKASI	Tolak Ukur/Indikator	Target	PAGU INDIKATIF	LOKASI	Tolak Ukur/Indikator	Target	PAGU INDIKATIF		
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = (14-10)	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	5.848.551.291	Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	5.966.339.290	(229.044.677)	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88	174.790.000	Kecamatan	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88	224.790.000	50.000.000	
7.01.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2	25.000.000	Kecamatan	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2	25.000.000	-	

7.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamat an	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	1	15.000.000	Kecamat an	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	1	15.000.000	-	
7.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamat an	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	2	15.000.000	Kecamat an	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	2	40.000.000	25.000.00 0	Penamba han Pagu Kegiatan
7.01.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamat an	Jumlah Dokumen DPA	1	9.520.000	Kecamat an	Jumlah Dokumen DPA	1	9.520.000,0 0	-	
7.01.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamat an	Jumlah Dokumen DPA	2	10.270.000	Kecamat an	Jumlah Dokumen DPA	2	35.270.000	25.000.00 0	Penamba han Pagu Kegiatan
7.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamat an	Jumlah Laporan Capaian Kierja yang dibuat	2	100.000.00 0	Kecamat an	Jumlah Laporan Capaian Kierja yang dibuat	2	100.000.00 0	-	

7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan	Uraian indikator kinerja		3.739.957.534	Kecamatan	Uraian indikator kinerja		3.769.127.534	29.170.000	
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	Jumlah ASN	25	3.640.623.034	Kecamatan	Jumlah ASN	300	3.640.623.034	-	
7.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	25.184.500	Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	25.184.500	-	
7.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	74.150.000	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	103.320.000	29.170.000	Penambahan Honor pengelola Keuangan
7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	65.761.100	Kecamatan	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	65.761.100	-	

7.01.01.2.0 3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	63	24.961.100	Kecamatan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	63	24.961.100	-	
7.01.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	63	40.800.000	Kecamatan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	63	40.800.000	-	
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	29.092.500	Kecamatan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	29.092.500	-	

7.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	29.092.500	Kecamatan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	29.092.500	-	
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	65	464.486.000	Kecamatan	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	65	479.804.807	-	
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah komponen listrik yang tersedia	6	10.000.000	Kecamatan	Jumlah komponen listrik yang tersedia	6	10.000.000	-	
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	30	20.000.000	Kecamatan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	30	20.000.000	-	
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	3	97.289.000	Kecamatan	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	3	97.289.000	-	

7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2000	30.000.000	Kecamatan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2000	30.000.000	-	
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Jumlah tamu yang berkunjung	20	32.469.000	Kecamatan	Jumlah tamu yang berkunjung	20	32.469.000	-	
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	155	224.728.000	Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	155	224.728.000	-	
7.01.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan	Jumlah arisp yang di penatausahakan	1000	50.000.000	Kecamatan	Jumlah arisp yang di penatausahakan	1000	65.318.807	15.318.807	Penambahan Pagu Anggaran

7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kecamat an			285.662.97 0	285.662.9 70	
7.01.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamat an	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	285.662.97 0	285.662.9 70	Penamba han Sub Kegiatan
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamat an	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63	820.084.57 7	Kecamat an	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63	603.571.70 0	(262.363.7 77)	
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamat an	Jumlah surat menyurat	200	1.989.000	Kecamat an	Jumlah surat menyurat	200	1.989.000	-	
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamat an	Jumlah rekening yang di sediakan	96	535.707.20 9	Kecamat an	Jumlah rekening yang di sediakan	96	318.970.00 0	(216.737.2 09)	Efesiensi Anggaran
7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamat an	Jumlah jenis jasa yang disediakan	2	12.568.000	Kecamat an	Jumlah jenis jasa yang disediakan	2	12.568.000	-	
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamat an	Jumlah orang jasa pelayanan umum	13	269.820.36 8	Kecamat an	Jumlah orang jasa pelayanan umum	13	270.044.70 0	224.332	Penamba han Pagu Kegiatan

7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	67	554.379.580	Kecamatan	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	67	508.528.680	(45.850.900)	
7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	4	382.656.900	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	4	336.806.000	(45.850.900)	Efisiensi Anggaran
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Mesin dan peralatan yang terpelihara	2	49.560.000	Kecamatan	Jumlah Mesin dan peralatan yang terpelihara	2	49.560.000	-	
7.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	122.162.680	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	122.162.680	(0)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	9.370.207.047	Kecamatan	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	9.189.497.048	(54.865.999)	
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	65	9.370.207.047	Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	65	9.189.497.048	(54.865.999)	

7.01.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	30.400.000	Kecamatan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	30.400.000	-	
7.01.02.2.0 4.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	62	9.339.807.047	Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	62	9.159.097.048	(180.709.999)	Efisiensi Anggaran Perjalanannya Dinas
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	75	480.600.000	Kecamatan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	75	543.522.000	62.922.000	
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	65	480.600.000	Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	65	543.522.000	62.922.000	
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang	Orang	75.000.000	Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang	Orang	75.000.000	-	
7.01.03.2.0 1.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Desa	72.600.000	Kecamatan	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Desa	39.525.000	(33.075.000)	Efisiensi Anggaran

7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	333.000.000	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	428.997.000	205.240.000	95.997.000	Penambahan Anggaran Kegiatan MTQ Tk Kabupaten
									32.000.000		
									191.757.000		Efisiensi Anggaran
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	19.754.000	Kecamatan	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	19.754.000	-	
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65	19.754.000	Kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65	19.754.000	-	
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang bersinergi	1	19.754.000	Kecamatan	Jumlah Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang bersinergi	1	19.754.000	-	

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamat an	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	70	43.803.750	Kecamat an	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	70	43.803.750	-	
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamat an	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	65	43.803.750	Kecamat an	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	65	43.803.750	-	
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamat an	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	22.811.250	Kecamat an	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	22.811.250	-	
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamat an	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	Kegiat an	20.992.500	Kecamat an	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	Kegiatan	20.992.500	-	
JUMLAH					15.762.916. 088				15.762.916. 088	0	

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat tentang program pembangunan terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan setiap satu tahun sekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih di fokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan, jembatan serta infrastruktur kecamatan

Dalam Deskripsi yang disajikan tentang bagaimana Usulan program dan kegiatan wilayah usulan pemangku kepentingan dapat di peroleh dan kesesuaian usulan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Program kegiatan yang menjadi prioritas adalah proses pemberdayaan Masyarakat melalui pemberian bantuan pada kelompok tani dan budi daya ikan air tawar, sementara itu, terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan melaksanakan pembangunan skala kecil, menetapkan prioritas pembangunan pada penanganan masalah banjir dan perbaikan gang, faktor sosial masyarakat Kecamatan Muara Badak mengambil penting yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kecamatan Muara Badak. Adapun usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Muara Badak lihat tabel 1.4 berikut :

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka penetapan program dan kegiatan atau sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kantor Camat Muara Badak dengan RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2021-2026 bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 yang akan datang yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJM Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Kartanegara tahun 2022, ada beberapa poin penting terkait dengan tema pembangunan Kutai Kartanegara yakni Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini seiring perumusan rencana program dan kegiatan dikecamatan Muara Badak tahun 2022.

Dalam pemetaan program dan kegiatan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun yang menjadi penekanan dalam perumusan rencana program dan kegiatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 yaitu :

1. Penguatan modal sosial dalam mendukung upaya penyediaan kebutuhan dasar dan penurunan kemiskinan daerah.
2. Pengembangan potensi sektor ekonomi terbarukan dalam menopang perekonomian daerah dalam jangka panjang.
3. Penguatan kompetensi birokrasi yang handal dan melayani.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Muara Badak dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai antara beban kerja dengan kompetensi.
2. Masih lemahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan mengakibatkan tidak maksimalnya koordinasi antar seksi.
3. Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme pola kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja antara lain.

1. Pelimpahan kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan operasional, peralatan dan pembiayaan.
2. Kurangnya SDM di tingkat kewilayahan. Adapun permasalahan yang dihadapi.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan.
4. Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku.
5. Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani Keuangan.

Ketiga pokok permasalahan tersebut diorientasikan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 sebagai penjabaran dari RPJM Kutai Kartanegara 2021-2026, serta menjadi kebijakan umum dalam penyusunan RKPD merupakan penguatan terhadap potensi ekonomi terbarukan dalam rangka pembangunan potensi perekonomian yang kuat dan berkelanjutan, hal ini ditetapkan pertanian pariwisata sebagai sektor kunci perekonomian daerah dalam perspektif pembangunan ekonomi jangka panjang. Serta meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah dalam konteks pengembangan infrastruktur dan komoditi unggulan daerah dalam skema keterpaduan potensi antar wilayah, sehingga pembangunan tidak hanya melalui pendekatan sektoral namun harus memperhatikan potensi kewilayahan secara komprehensif, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha khususnya kepada masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

- a) Pemantapan percepatan penyelenggaraan Reformasi dan Birokrasi
- b) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c) Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana wilayah kecamatan.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN 2022													
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023													
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA													
Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Badak													
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	LOKASI	PAGU INDIKATIF	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	LOKASI	PAGU INDIKATIF		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	Kecamatan	5,848,551,291	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	Kecamatan	5,966,339,291	117,788,000	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88	Kecamatan	174,790,000	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88	Kecamatan	224,790,000	50,000,000	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88	-
7.01.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2	Kecamatan	25,000,000	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2	Kecamatan	25,000,000	-	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2	8,549,600
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	1	Kecamatan	15,000,000	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	1	Kecamatan	15,000,000	-	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA	1	15,000,000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	2	Kecamatan	15,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	2	Kecamatan	40,000,000	25,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	2	15,000,000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	Kecamatan	9,520,000	Jumlah Dokumen DPA	1	Kecamatan	9,520,000	-	Jumlah Dokumen DPA	1	9,520,000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	2	Kecamatan	10,270,000	Jumlah Dokumen DPA	2	Kecamatan	35,270,000	25,000,000	Jumlah Dokumen DPA	2	10,270,000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kierja yang dibuat	2	Kecamatan	100,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kierja yang dibuat	2	Kecamatan	100,000,000	-	Jumlah Laporan Capaian Kierja yang dibuat	2	150,000,000

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Uraian indikator kinerja		Kecamatan	3,739,957,534	Uraian indikator kinerja		Kecamatan	3,769,127,534	29,170,000	Uraian indikator kinerja		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	300	Kecamatan	3,640,623,034	Jumlah ASN	300	Kecamatan	3,640,623,034	-	Jumlah ASN	300	3,717,922,856
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Kecamatan	25,184,500	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Kecamatan	25,184,500	-	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	25,484,900
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Kecamatan	74,150,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Kecamatan	103,320,000	29,170,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	125,040,000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	Kecamatan	65,761,100	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	Kecamatan	65,761,100	-	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	63	Kecamatan	24,961,100	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	63	Kecamatan	24,961,100	-	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	63	25,000,000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	63	Kecamatan	40,800,000	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	63	Kecamatan	40,800,000	-	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	63	40,800,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	Kecamatan	29,092,500	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	Kecamatan	29,092,500	-	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	Kecamatan	29,092,500	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	Kecamatan	29,092,500	-	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	29,092,792

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	65	Kecamatan	464,486,000	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	65	Kecamatan	479,804,807	15,318,807	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	65	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	6	Kecamatan	10,000,000	Jumlah komponen listrik yang tersedia	6	Kecamatan	10,000,000	-	Jumlah komponen listrik yang tersedia	6	4,348,500
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	30	Kecamatan	20,000,000	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	30	Kecamatan	20,000,000	-	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	30	32,611,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	3	Kecamatan	97,289,000	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	3	Kecamatan	97,289,000	-	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	3	94,858,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2000	Kecamatan	30,000,000	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2000	Kecamatan	30,000,000	-	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2000	8,734,900
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	20	Kecamatan	32,469,000	Jumlah tamu yang berkunjung	20	Kecamatan	32,469,000	-	Jumlah tamu yang berkunjung	20	50,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	155	Kecamatan	224,728,000	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	155	Kecamatan	224,728,000	-	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	155	230,860,000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang di penatausahakan	1000	Kecamatan	50,000,000	Jumlah arsip yang di penatausahakan	1000	Kecamatan	65,318,807	15,318,807	Jumlah arsip yang di penatausahakan	1000	176,821,440

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-			Kecamatan	285,662,970	285,662,970			
7.01.01.2.07.11						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Kecamatan	285,662,970	285,662,970	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63	Kecamatan	820,084,577	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63	Kecamatan	603,571,700	- 216,512,877	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	200	Kecamatan	1,989,000	Jumlah surat menyurat	200	Kecamatan	1,989,000	-	Jumlah surat menyurat	200	2,398,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di sediakan	96	Kecamatan	535,707,209	Jumlah rekening yang di sediakan	96	Kecamatan	318,970,000	- 216,737,209	Jumlah rekening yang di sediakan	96	360,800,458
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa yang disediakan	2	Kecamatan	12,568,000	Jumlah jenis jasa yang disediakan	2	Kecamatan	12,568,000	-	Jumlah jenis jasa yang disediakan	2	12,568,400
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang jasa pelayanan umum	13	Kecamatan	269,820,368	Jumlah orang jasa pelayanan umum	13	Kecamatan	270,044,700	224,332	Jumlah orang jasa pelayanan umum	13	279,131,328
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	67	Kecamatan	554,379,580	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	67	Kecamatan	508,528,680	- 45,850,900	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	67	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	4	Kecamatan	382,656,900	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	4	Kecamatan	336,806,000	- 45,850,900	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	4	341,560,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan yang terpelihara	2	Kecamatan	49,560,000	Jumlah Mesin dan peralatan yang terpelihara	2	Kecamatan	49,560,000	-	Jumlah Mesin dan peralatan yang terpelihara	2	32,870,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Kecamatan	122,162,680	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Kecamatan	122,162,680	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	149,892,620

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	Kecamatan	9,370,207,047	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	Kecamatan	10,289,497,047	919,290,000	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	65	Kecamatan	9,370,207,047	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	65	Kecamatan	10,289,497,047	919,290,000	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	65	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Kecamatan	30,400,000	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Kecamatan	30,400,000	-	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	30,533,353
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	62	Kecamatan	9,339,807,047	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	64	Kecamatan	10,259,097,047	919,290,000	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	62	5,820,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	75	Kecamatan	480,600,000	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	75	Kecamatan	568,522,000	87,922,000	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	75	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	65	Kecamatan	480,600,000	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	65	Kecamatan	568,522,000	87,922,000	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	65	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang	Orang	Kecamatan	75,000,000	Jumlah peserta Musrenbang	Orang	Kecamatan	75,000,000	-	Jumlah peserta Musrenbang	Orang	75,000,000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Desa	Kecamatan	72,600,000	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Desa	Kecamatan	39,525,000	- 33,075,000	Jumlah Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Desa	72,600,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	Kecamatan	333,000,000	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	4	Kecamatan	453,997,000	120,997,000	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	3	333,045,900

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan	19,754,000	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan	19,754,000		persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65	Kecamatan	19,754,000	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65	Kecamatan	19,754,000		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang bersinergi	1	Kecamatan	19,754,000	Jumlah Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang bersinergi	1	Kecamatan	19,754,000		Jumlah Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang bersinergi	1	19,754,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	70	Kecamatan	43,803,750	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	70	Kecamatan	43,803,750		Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	70	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	65	Kecamatan	43,803,750	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	65	Kecamatan	43,803,750		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	65	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	Kecamatan	22,811,250	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	Kecamatan	22,811,250		Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	22,811,250
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	Kegiatan	Kecamatan	20,992,500	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	Kegiatan	Kecamatan	20,992,500		Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	Kegiatan	20,992,500
JUMLAH					15,762,916,088				16,887,916,088				12,343,871,7

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Muara Badak Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rancangan Awal Renja Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022. Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Muara Badak , maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Muara Badak diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Muara Badak, 12 September 2022

Camat Muara Badak


APPAN, S. Sas
Pembina
Nip.19680612 198803 1 007